

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI BELANJA  
LANGSUNG TAHUN 2009-2013**

**Desak Ayu Putu Inten Suari<sup>1</sup>  
Ni Putu Martini Dewi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia  
e-mail: desakintensuari@gmail.com

**ABSTRAK**

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai di suatu negara. Keberhasilan suatu negara dapat diukur dalam meningkatkan kesejahteraan warganya melalui pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung kabupaten /kota di provinsi Bali. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap belanja langsung. Dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap belanja langsung. Jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana perimbangan tidak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja langsung memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk dan dana perimbangan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung yang ditunjukkan dengan belanja langsung yang merupakan variabel intervening.

**Kata kunci:** Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung

**ABSTRACT**

Economic growth is a matter of a country's economy in the long term. Achieved economic growth rates of a country is measured from the development of real national income is achieved in a country. The success of a country can be measured in enhancing the welfare of its citizens through economic growth. The purpose of this study was to analyze the effect of the population and fund balance on economic growth through direct spending districts / municipalities in the province of Bali. Based on the analysis found that the number of the population has a significant and negative effect on the direct spending. Fund balance has a significant influence and positive impact on direct spending. The population does not have a significant and negative effect on economic growth. The balancing fund does not have significant and positive effect on economic growth. Direct spending has a significant and positive effect on economic growth. The population and the balance funds have indirect influence on economic growth through direct expenditure shown by direct spending that an intervening variable.

**Keywords:** Population, Balanced Fund, Growth, Shopping Direct

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan meningkatnya ketersediaan infrastruktur di daerah maka turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dari segi pemenuhan kebutuhan sekunder (Barimbing, 2015). Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah selalu menetapkan target laju pertumbuhan didalam perencanaan dan tujuan pembangunannya (Eka Raswita, 2013). Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi di daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu ; modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 1994:456). Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memperlihatkan peningkatannya dari tahun ketahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis (Dewi, 2013).

Perekonomian yang tumbuh dan berkembang tidak bisa lepas dari peran pemerintah melalui upaya-upaya yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat (Wijayanti, 2015). Sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2001 telah melaksanakan otonomi daerah yang tentunya memerlukan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Muryawan, 2014). Pemerataan ekonomi Bali antar Kabupaten/Kota hingga kini masih menjadi pekerjaan bersama antara pemerintah provinsi dan kab/kota.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota provinsi Bali setiap tahunnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif tetapi kalau dilihat antara kabupaten/kota di provinsi Bali masih terjadi perbedaan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada Kabupaten Badung yaitu 7,30 persen dan yang terendah di Kabupaten Karangasem yang mencapai 5,73 persen (Tabel 1).

**Tabel 1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**

Kab/Kota Provinsi	20 02	20 03	20 04	20 05	20 06	20 07	20 08	20 09	20 10	20 11	20 12
Buleleng	4,06	4,84	4,98	5,60	5,35	5,82	5,84	6,10	5,85	6,11	6,52
Jembrana	3,06	3,58	4,86	5,00	4,52	5,11	5,05	4,82	4,57	5,61	5,90
Tabanan	4,54	4,91	4,73	5,96	5,25	5,76	5,22	5,44	5,68	5,82	5,91
Badung	3,90	3,00	5,78	5,61	5,03	6,85	6,91	6,39	6,48	6,69	7,30
Gianyar	3,48	3,33	4,95	5,47	5,20	5,89	5,90	5,93	6,04	6,76	6,79
Bangli	3,03	3,38	4,03	4,46	4,25	4,48	4,02	5,71	4,97	5,84	5,99
Klungkung	5,53	3,10	4,67	5,41	5,03	5,54	5,07	4,92	5,43	5,81	6,03
Karangasem	3,09	4,05	4,49	5,13	4,80	5,20	5,07	5,01	5,09	5,19	5,73
Denpasar	5,03	5,31	5,83	6,05	5,88	6,60	6,83	6,53	6,57	6,77	7,18
Bali	3,04	3,57	4,62	5,56	5,28	5,92	5,97	5,33	5,83	6,49	6,65

Sumber : Bappeda Kab/Kota Provinsi Bali

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat PDRB per kapita tertinggi Kabupaten Badung mencapai Rp. 32,85 juta per tahun dan yang terendah di Kabupaten Karangasem yang mencapai Rp. 12,77 juta per tahun. Todaro (2003) mengatakan bahwa apabila laju pertumbuhan secara material meningkat maka keberhasilan pembangunan akan tercapai, namun akan muncul permasalahan pemerataan hasil pembangunan.

Setiap daerah kabupaten/kota mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Hal ini terlihat dengan adanya perbedaan pertumbuhan

ekonomi antara wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju (Gebbert *et al.*, 2005). Sebagai contoh dapat diambil kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng. Kondisi pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar cenderung lebih baik dari pada Kabupaten Buleleng. Hal tersebut di buktikan dengan meningkatnya infrastruktur yang ada di Kota Denpasar dari pada di Buleleng. Dengan meningkatnya infrastruktur telah menunjukkan bahwa memang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi faktor pemicu ketersediaan infrastruktur. (BPS, 2013).

Kota Denpasar menjadi daerah di Provinsi Bali dengan kepadatan jumlah penduduk yang tinggi, itu artinya di Provinsi Bali memang telah terjadi ketimpangan. Namun, uniknya adalah dengan jumlah penduduk yang padat, Kota Denpasar mampu mempertahankan kondisi pertumbuhan ekonomi dengan terus melakukan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Seperti, Rumah Sakit Bali Mandara yang terletak di Sanur, fasilitas-fasilitas pendidikan, fasilitas umum, dll. Hal tersebut sangat berbeda kondisinya di daerah luar Denpasar kecuali Badung, dimana daerah-daerah lainnya cenderung minim fasilitas penunjangnya. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai (Yasa, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil setiap tahunnya menunjukkan kesejahteraan ekonomi meningkat, sementara perekonomian yang menurun atau pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti turunnya kesejahteraan ekonomi. Disisi lain tingkat pertumbuhan ekonomi juga

digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian.

Adanya ketimpangan setiap daerah dalam segi pertumbuhan ekonomi menyebabkan perbedaan dalam pengelolaan wisata yang dimiliki. Mengingat Provinsi Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata dunia yang memiliki potensi keindahan alam serta keunikan budaya dan kehidupan sosial masyarakatnya, serta sektor pariwisata menjadi sektor andalan perekonomian Provinsi Bali. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Disamping itu perlu diingat pula, bahwa pengusaha adalah sebagian dari penduduk. Maka luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara juga bergantung kepada jumlah pengusaha dalam ekonomi. Apabila tersedianya pengusaha dalam sejumlah penduduk tertentu lebih banyak, maka akan lebih banyak kegiatan ekonomi yang dijalankan (Sukirno, 2006:430). Tenaga kerja sebagai salah satu dari faktor produksi merupakan unsur yang penting dan paling berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi (Sintya Dewi, 2015).

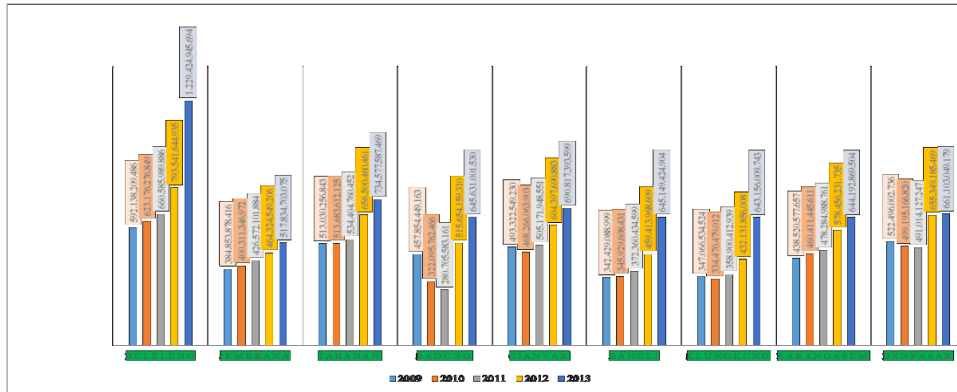
Secara teoritis pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan memicu pertumbuhan output, sehingga dibutuhkanlah tenaga kerja yang tinggi pula, dari sana dibutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk memenuhi permintaan output yang meningkat (Arsyad, 2010). Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, kemampuan keuangan suatu daerah merupakan salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi. Dengan pelaksanaan otonomi daerah pemerintah

kabupaten/kota di provinsi bali dituntut untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya agar kemandirian dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya dalam pemanfaatan potensi-potensi di daerahnya (Arini, 2015). Adanya tekanan fiskal sejak diberlakukannya otonomi daerah karena dengan adanya kewenangan daerah untuk mengelola keuangan sendiri dan daerah harus dituntut untuk lebih mandiri sehingga Pemerintah di kabupaten/kota Provinsi Bali lebih intensif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah.

Kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi dapat dilihat dengan mengetahui kinerja keuangan daerah (Krisna Dewi, 2015). Penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan kepada anggaran belanja langsung tidak diperbolehkan melebihi belanja rutin, agar pengeluaran dana dapat dijadikan investasi untuk saat-saat yang tidak terduga. Pemerintah daerah seharusnya memperhatikan hal tersebut sehingga belanja langsung yang mengarah pada peningkatan infrastruktur dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (Felix, 2012;1).

Berdasarkan Gambar 1, dana perimbangan yang diperoleh tiap Kabupaten/Kota selama periode 2009-2013 berfluktuasi di beberapa Kabupaten/Kota, namun cenderung meningkat.

**Gambar 1. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013 (dalam juta rupiah)**



Sumber: BPS Provinsi Bali (2013)

Sesuai penjelasan, dapat diambil suatu pemahaman bahwa kondisi ketimpangan di daerah tidak hanya dalam pertumbuhan ekonomi setiap daerah, melainkan juga penerimaan dana perimbangan. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah khususnya di Provinsi Bali akan mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian sehingga akan mengurangi ketimpangan yang terjadi. Adanya pengeluaran pemerintah secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah juga menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (A Salhab, 2012).

Kebijakan pemerintah yaitu dengan mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Setiawan, 2015). Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang dikeluarkan guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Seluruh pembelanjaan yang dilakukan pemerintah akan dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan meningkatnya pembiayaan nasional dengan belanja langsung maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dikarenakan dengan penggunaan belanja langsung yang tepat sasaran seluruh permasalahan infrastruktur dan juga ketimpangan di daerah akan berkurang.

Jumlah anggaran belanja langsung dapat ditentukan melalui jumlah penduduk dan dana perimbangan. Dimana, dengan jumlah penduduk yang besar maka pemerintah daerah akan menggunakan anggaran yang besar pula terhadap belanja langsung. Selain jumlah penduduk, banyaknya dana perimbangan yang digunakan juga dapat mencerminkan anggaran belanja langsung. Semakin besar dana perimbangan yang dikeluarkan, maka anggaran belanja langsung akan naik atau besar pula. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis berusaha membuktikan hal tersebut menggunakan data-data yang ada. Dana perimbangan merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk memacu pembangunan-pembangunan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut pun meningkat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sumiyarti dan Imamy (2005), tentang pengaruh dana perimbangan pusat daerah terhadap perekonomian Kota Depok, didapat hasil bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap PDRB Kota Depok. Studi lain tentang pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan oleh Hidayat dan Sirojuzilam (2006),



yang melakukan penelitian pada Kota Medan. Dari hasil yang didapat menyatakan bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Dari penelitian-penelitian tersebut, memberi arti bahwa masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Wahyuni (2014), membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga kenaikan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini sesuai dengan teori dari Rostow dan Musgrave yang menyatakan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam mengelola pengeluaran. Dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk dikelola dan dialokasikan dengan baik dalam pembangunan ekonomi, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Mangkoesoebroto, 1993). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dipengaruhi oleh pengalokasian belanja modal melalui anggaran dana alokasi umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Alexiou, 2009;1). Pemerintah harus meningkatkan pengeluaran pada infrastruktur, sosial dan kegiatan ekonomi, selain itu, pemerintah harus mendorong dan mendukung inisiatif sektor swasta dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi (Egbetunde dan Fasanya, 2013).

Implementasi pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat ditinjau dari alokasi realisasi alokasi dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah kabupaten/kota. Dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil) erat kaitannya dengan besarnya pengeluaran pemerintah dalam hal ini belanja langsung terlebih bagi daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang rendah dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk kepentingan publik. Fransisca Roossiana Kurniawati (2010), juga menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia. Tujuan utama dari DAU, menurut hukum dan peraturan yang ada, adalah untuk membuat bahkan kapasitas fiskal daerah pemerintah untuk membiayai pengeluaran agar pemerataan terjadi dan dapat mengelolanya dengan baik (Blane, 2010). Penduduk selain merupakan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai subjek dan objek pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah perlu mengetahui perkembangan jumlah penduduknya, baik menurut angkatan kerja, menurut lapangan kerja, berdasarkan kelompok umur serta berdasarkan pendidikan, berdasarkan kabupaten/kota dan lainnya agar dapat dijadikan referensi dalam membuat suatu kebijakan untuk perencanaan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan untuk dapat mensejahterakan masyarakat dapat tercapai sesuai rencana. Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, maka dapat diajukan rumusan hipotesis sebagai berikut.

- 1) Jumlah penduduk dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

- 2) Jumlah penduduk, dana perimbangan dan belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk deskriptif, artinya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang digunakan pada penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena didasarkan pada data kuantitatif yang berdasarkan temuan-temuan yang dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (Rahyuda, 2004:7). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma asosiatif. Peneliti akan melakukan eksperimen untuk mengetahui hubungan beberapa variabel, yaitu pengaruh langsung variabel jumlah penduduk dan dana perimbangan terhadap belanja langsung, pengaruh langsung jumlah penduduk dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi serta pengaruh tidak langsung dari jumlah penduduk dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Lokasi dari penelitian ini adalah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali. Dipilihnya lokasi ini karena Provinsi Bali memang terjadi pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya jika dilihat pada Provinsi Bali seluruhnya, namun jika dilihat dari Kabupaten/Kota masih ada ketimpangan antara Bali utara dan Bali selatan. Menurut Sugiyono (2013: 104), obyek penelitian adalah apa yang akan

diselidiki dalam kegiatan penelitian. Obyek pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013.

Dalam penelitian ini yang berupa data kualitatif yang digunakan adalah teori-teori dan penjelasan mengenai Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan, Belanja Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain (Sugiyono, 2013). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data Jumlah Penduduk kabupaten/kota, data realisasi Dana Perimbangan kabupaten/kota, data realisasi Belanja Langsung kabupaten/kota dan Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Populasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Provinsi Bali. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2013:116). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009-2013.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi non partisipan yaitu dengan cara analisis catatan, analisis kondisi fisik dan analisis proses fisik yang berupa mengamati, mencatat, serta mempelajari uraian dari buku-buku, artikel, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, dan dokumen – dokumen yang terdapat dari instansi terkait seperti Badan Pusat statistik (BPS), *browsing*, dan buku-buku literatur tentang Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan, Belanja Langsung, dan Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis

jalur (*path analysis*). Analisis jalur (*path analysis*) merupakan pengembangan dari analisis regresi, sehingga analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari analisis jalur (*regression is special case of path analysis*). Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (Sugiyono, 2013:297).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dilakukan dengan dua tahap, yaitu: (a) pengujian pengaruh langsung dan (b) pengujian pengaruh tidak langsung dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antarvariabel**

Regresi	Koef. Reg. Standar	Standar Error	T. Hitung	P. Value	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	-0,346	3968,726	-2,260	0,029	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,436	0,217	2,848	0,007	Signifikan
$X_1 \rightarrow Y_2$	-0,020	0,010	-0,145	0,885	Tidak Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,236	0,000	1,661	0,104	Tidak Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,542	0,000	4,126	0,000	Signifikan

Sumber: Data primer diolah, 2016

Keterangan:

$X_1$  = Jumlah Penduduk

$X_2$  = Dana Perimbangan

$Y_1$  = Belanja Langsung

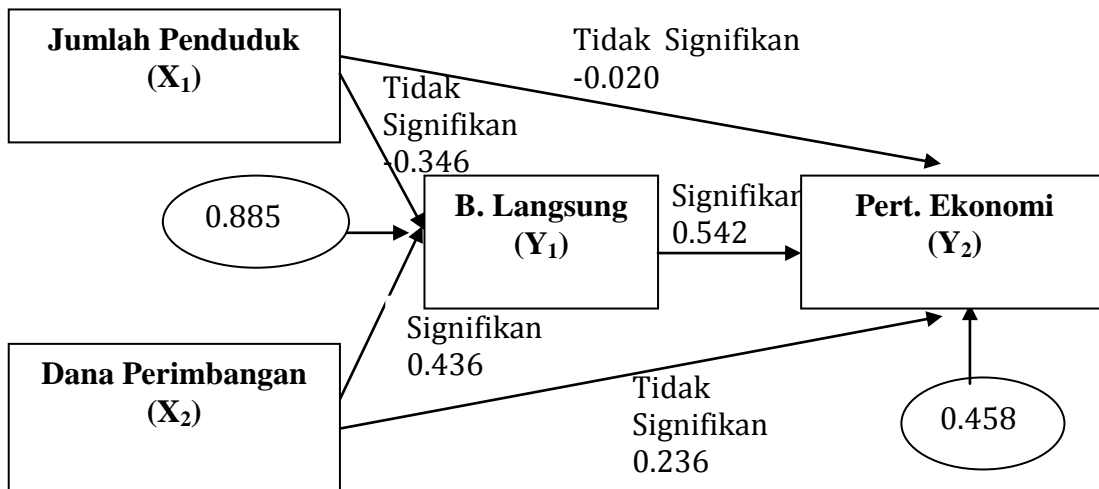
$Y_2$  = Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap belanja langsung ( $Y_1$ ), dan dana perimbangan ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap

belanja langsung (Y1). Jumlah penduduk (X1) berpengaruh tidak signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2), dana perimbangan (X2) berpengaruh tidak signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2). Belanja langsung (Y1) berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2).

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 53 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 53 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 47 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

**Gambar 2**  
**Diagram Hasil Analisis Jalur**



Nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0.346 dan nilai probabilitas sebesar  $0.029 < 0.05$  ini berarti  $H_0$  diterima, artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja langsung.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.436 dan nilai probabilitas sebesar  $0.007 < 0.05$  ini berarti  $H_0$  ditolak, artinya dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung.

Hubungan positif dan signifikan variabel dana perimbangan terhadap belanja langsung menunjukkan bahwa realisasi dana perimbangan mampu mendongkrak belanja langsung. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Jariyah (2014) bahwa bagian dari dana perimbangan yaitu dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Belanja modal merupakan bagian dari belanja langsung. Selanjutnya Sasana (2009), menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal merupakan pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang dimaksud disini yaitu dana perimbangan. Hal ini membuktikan bahwa tingginya realisasi dana perimbangan merupakan indikator penting dalam menunjang belanja langsung.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0.020 dan nilai probabilitas sebesar  $0.885 > 0.05$  ini berarti  $H_0$  diterima, artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.236 dan nilai probabilitas sebesar 0.104 > 0.05 ini berarti  $H_0$  diterima, artinya dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.542 dan nilai probabilitas sebesar 0.000 < 0.05 ini berarti  $H_0$  ditolak, artinya belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hubungan positif dan signifikan variabel belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja langsung berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Adi (2006) bahwa bagian dari belanja langsung, yaitu belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain jika pengeluaran pembangunan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi meningkat dan begitu sebaliknya.

Rrefleksi *trend* PDRB mendeskripsikan bahwa pertumbuhan ekonomi dipacu oleh tinggi rendahnya barang dan jasa yang dihasilkan, dimana untuk memaksimalkan produktivitas barang dan jasa diperlukan anggaran belanja langsung yang besar. Bose and Osborn (2007), menyatakan bahwa belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi dalam penelitian tersebut diprosikan melalui GDP. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh Chude and Chude (2013) yang membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Hal



ini membuktikan bahwa tingginya realisasi belanja langsung merupakan indikator penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

$$z = 0.00008$$

Oleh karena Z hitung sebesar  $0.00008 < 1.96$ . Artinya belanja langsung ( $Y_1$ ) bukan merupakan variabel intervening pengaruh jumlah penduduk ( $X_1$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) di Provinsi Bali.

$$z = 2.009$$

Oleh karena Z hitung sebesar  $2.009 > 1.96$ . Artinya belanja langsung ( $Y_1$ ) merupakan variabel intervening pengaruh dana perimbangan ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) di Provinsi Bali.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yaitu jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja langsung. Dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap belanja langsung. Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja langsung memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk dan dana perimbangan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung yang ditunjukkan dengan belanja langsung yang merupakan variabel intervening.

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang diuraikan maka dapat diajukan beberapa saran yaitu berkaitan dengan kegiatan pemerintah dalam hal belanja langsung, pemerintah juga harus selalu memantau pergerakan jumlah penduduk dan mengendalikannya agar dapat membuat belanja langsung menjadi efisien. Pemerintah juga harus mengoptimalkan dana perimbangan yang dimiliki seperti DAU, DAK dan Hibah untuk dialokasikan kepada belanja langsung yang sangat bergantung pada ketersediaan dana yang ada. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu adanya perencanaan yang termuat di RAPBD dalam bentuk belanja langsung khususnya. Dengan membuat belanja langsung menjadi efisien serta optimal, sebaiknya pemerintah mengalokasikan belanja langsung pada bidang yang tepat. Alasannya, total anggaran belanja langsung yang tinggi tiap tahunnya belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, seharusnya hal tersebut terjadi mengingat hubungan antara keduanya berkorelasi positif. Untuk itu pemerintah perlu lebih bijak dalam mengatur anggaran dan sasaran yang diterapkan dalam belanja langsung, sehingga rencana peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Pemerintah juga sebaiknya lebih berhati-hati dalam menggunakan variabel-variabel yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Tentunya agar variabel tersebut dapat benar-benar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Faktanya, sampai saat ini pemerintah belum mampu menerapkan variabel yang cocok untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan penelitian ini, diharapkan pemerintah menjadi lebih tahu tentang variabel-variabel apa saja yang dapat digunakan.

## REFERENSI

- Adi, P. H. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Alexiou, Constantinos. 2009. *Government Spending and Economic Growth : Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SSE)*. *Journal of Economic and Social Research* 11(1) : 1-16.
- Arini. 2015. Pengaruh PAD, dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali Tahun 2007-2013. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(9), pp: 1140-1163.
- Arsyad, Lincoln. 2010, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Ed 1*. Yogyakarta: BPFE
- Badan Pusat Statistik. 2013. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2009-2013. BPS Provinsi Bali
- Barimbing, Yesika Resiana. 2015. Pengaruh PAD, Tenaga Kerja, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(5), pp: 434-450.
- Blane, D Lewis. 2010. *The New Indonesian Equalisation Transfer*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37 (3), pp: 325-343.
- Bose, N., Haque, M.E., and Osborn, D.R. 2007. Public Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis for Developing Countries. *The Manchester School*. Vol. 75(5): 533-556.
- Chude, N. P., and Chude, D. I. 2013. Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria. *International Journal of Business and Management Review*. Vol. 1(4): 64-71
- Dewi, Sakita Laksmi. 2013. Pengaruh PAD, PMA dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(11), pp: 502-512.
- Egbetunde, Tajudeen dan Fasanya, Ismail O. 2013. Public Expenditure and Economic Growth in Nigeria: Evidence from Auto-Regressive Distributed Lag Specification. *Zagreb International Review of Economics & Business*, Vol. 16, No. 1

- Eka Raswita, Ngakan Putu Mahesa. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(3), pp: 119-128.
- Felix, Olurankinse. 2012. *Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. Journal of Accounting and Taxation*, 4(1), pp: 1-6.
- Fransisca Roossiana Kurniawati, 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, Dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal*.
- Gebbert, Kurt, Michael Happich dan Andreas Stephan. 2005. Regional Disparities in The European Union: Convergence and Agglomeration. *German Institute of Economic Research. DIW Berlin*.
- Hidayat, Paidi dan Sirojuzilam, 2006. Kajian Tentang Keuangan Daerah Kota Medan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Wahana Hijau*, Vol. 2, No.1.
- Jariyah, Ainun. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jhingan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Krisna Dewi, Putu Ayu. 2015. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(1), pp: 32-40.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Muryawan, Sang Made. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiskal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kab/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(10), pp: 440-451.
- Rahyuda, Ketut, I Gusti Murjana Yasa dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Denpasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar.

- Salhab, Amira. 2012. Pengaruh Inflasi, Jumlah Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(1), pp: 1-62.
- Sasana, Hadi. 2009. "Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 10, No. 1, Juni 2009, hal. 103-124
- Setiawan, Gusi Bagus Kompyang Putra. 2015. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(10), pp: 1276-1303.
- Sintya Dewi, Ni Made. 2015. Pengaruh Investasi dan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(6), pp: 621-636.
- Sugiyono. 2013. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 1994. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Perkasa . Jakarta.
- Sumiyarti dan Akhmad Fauzan Imamy, 2005. Analisis Pengaruh Perimbangan Pusat-Daerah terhadap Perekonomian Kota Depok. *Media Ekonomi*, Vol. 11, No. 2
- Suyana Utama, 2011. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Edisi Kesembilan, Jakarta: Erlangga
- Wahyuni I Gusti A. P, Made Sukarsa, Nyoman Yuliarmi. 2014. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten Kota di Provinsi Bali*. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Wijayanti, Ni Kadek Herni. 2015. Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(3), pp: 1164-1193.
- Yasa, I Komang Oka Artana. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(2), pp: 129-137.